 http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v6i2.24422

Penentuan Biaya Kompensasi Air dari Kota Cirebon untuk Penghijauan Desa Sekitar Mata Air Cipaniis Kabupaten Kuningan

Yaris Muhamad Iqbal,. Hani Burhanudin

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Yarisiqbal34@gmail.com

Abstract. Cirebon City and Kuningan Regency make a cooperation agreement to manage the Cipaniis springs to meet the water needs of the Cirebon City community and rotect the conservation area in Kuningan Regency. n its implementation, the City of Cirebon has provided compensation funds to Kuningan District based on a mutual agreement of IDR 110/m^3 with an average total compensation of IDR 2.65 billion in the last 5 years with the proportion of distribution of district PAD of 82%, BPLH of 16% and village level greening. by 1.5%. It is seen from the cooperation agreement that there is an unbalanced distribution of cost allocations between environmental conservation costs and local revenue (PAD) in Kuningan Regency. The impact that appears, the community around Cipaniis Springs always experiences drought in the dry season which should be able to compensate and get community empowerment from the agreement. So the purpose of this study is to determine the amount of the allocation of compensation funds, ensure that the funds provided by the City of Cirebon are sufficient for compensation needs and make a new percentage allocation of funds. The method used is the Contingent Valuation Method (CVM). This method is a survey-based approach to find out people's willingness preferences to receive compensation or Willingness to Accept (WTA) for changes in natural resources and the environment. Then the WTA results are compared with the value of Rp110 /m^3 to become an allocation for reforestation of the village. The results of this study indicate that the WTA value is Rp. 833 /m^3 with factors affecting monthly income, home ownership status, and water quality. Then the WTA value has a ratio of 7.6 from Rp110 /m^3. This comparison value becomes the value multiple of the allocation previously applied to greening the village. As a result, the value of reforestation received IDR 904,869,255 with a percentage of 34.2% of the total compensation costs, BPLH 30% and PAD Kuningan Regency 35.8%. The amount of the agreement granted by Cirebon City of Rp. 110 /m^3 is still sufficient for the use of PAD Kuningan Regency

Keywords: Compensation costs, Willingnes to Accept, Springs, Environmental Services

Abstrak. Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan membuat perjanjian kerjasama mengelola sumber mata air Cipaniis untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Cirebon dan melindungi kawasan konservasi di Kabupaten Kuningan. Kota Cirebon memberi dana kompensasi kepada Kabupaten Kuningan atas kesepakatan bersama sebesar Rp110/m^3 dengan total

konpensasi rata – rata Rp2,65 miliar dalam 5 tahun terakhir dengan proporsi pembagian PAD kabupaten sebesar 82%, BPLH sebesar 16% dan penghijauan tingkat desa sebesar 1,5%. Dilhat dari perjanjian kerja sama tersebut terdapat pembagian alokasi biaya yang tidak seimbang antara biaya pelestarian lingkungan dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan. Dampak yang muncul masyarakat sekitar Mata Air Cipaniis selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau yang seharusnya dapat konpensasi dan mendapat pemberdayaan masyarakat dari adanya perjanjian. Maka tujuan studi ini untuk menetukan besaran alokasi dana konpensasi, memastikan dana yang di berikan oleh Kota Cirebon cukup untuk kebutuhan konpensasi dan membuat persentase alokasi dana baru. Metode yang digukan mengunakan Contingent Valuation Method (CVM). Metode ini merupakan pendekatan atas dasar survei untuk dapat mengetahui preferensi kesediaan masyarakat untuk menerima konpensasi atau Willingness to Accept (WTA) atas perubahan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian dari hasil WTA tersebut dibandingkan dengan nilai Rp110/m^3 untuk menjadi alokasi untuk penghijauan desa. Hasil dari studi ini mendapat nilai WTA bernilai Rp.833/m^3 dengan faktor yang mepengarui pendapatan perbulan, stastus kepemilikan rumah, dan kualitas air. Maka nilai WTA memilki perbandingan 7,6 dari Rp110/m^3. Nilai perbandingan tersebut menjadi nilai kelipatan dari alokasi yang sebelumnya di terapkan untuk penghijauan desa. Hasilnya nilai penghijauan mendapat Rp.904.869.255 dengan persentase 34,2% dari total biaya konpensasi, BPLH 30% dan PAD Kabupaten Kuningan 35,8%. Besaran perjanjian yang diberikan Kota Cirebon sebesar Rp 110/m^3 masih cukup untuk penggunaan PAD Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: biaya Kompensasi, Willingnes to Accept, Mata Air, Jasa Lingkungan

1. Pendahuluan

Sejak zaman Belanda sampai saat ini Kota Cirebon masih memanfaatkan Mata air Cipaniis Kabupaten Kuningan sebagai mata air satu – satunya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Daerah aliran sungai Mata Air Cipaniis tersebut berada pada kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang sebagian besar ada pada administrasi Kabupaten Kuningan dan dan sebagian besar dimanfaatkan oleh daerah hilirnya yaitu Kota Cirebon yang merupakan pengguna utama sumber Mata Air Cipaniis. Sejak 1 Januari 2001 Indonesia menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mengatur daerahnya. Saat itu pengguna air yang berada di wilayah hilir yaitu Kota Cirebon yang memanfaatkan air dari Gunung Ciremai kurang memberikan kontribusi finansial bagi Kabupaten Kuningan sebagai daerah hulu yang selalu dituntut untuk melakukan konservasi daerah resapan air (Ramdan 2006). Atas dasar tersebut pemerintah Kabupaten Kuningan menuntut adanya kerja sama pengelolaan sumber Mata Air Cipaniis kepada Pemerintah Kota Cirebon.

Perjanjian kerja sama tersebut memliki peran masing – masing Pemerintah Kota Cirebon sebagai pemanfaat jasa lingkungan berhak memanfaatkan mata air Cipaniis sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kabupaten Kuningan dan berkewajiban membantu Kabupaten Kuningan dalam perlindungan dan pelestarian daerah serapan air atau *catchment area*. Adapun kewajiban Kabupaten Kuningan sebagai penyedia jasa lingkungan adalah menjaga dan melindungi sumber air mata air sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi air, memanfaatkan dana kompensasi pembayaran jasa lingkungan untuk kepentingan konservasi

sehingga dapat menjamin kelestarian sumber mata air, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat (kerja sama pengelolaan sumber daya air Desa Paniis Kabupaten Kuningan tahun 2012). Hal tersebut merupakan pembiayara jasa lingkungan yang sebagaimana di sebutkan UU 25 tahun 2012 tentang pembayaran jasa lingkungan (PJL) atau *Payment of Environmental Services (PES*). Pembayaran Jasa Lingkungan adalah instrumen berbasiskan pasar untuk tujuan konservasi yang berdasar pada prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Mekanisme PJL yang di sepakat saat ini Kota Cirebon memberikan kompensasi kepada Kabupaten Kuningan sebesar Rp 110/m^3 setelah dikurangi kebocoran 20%. Harga kompensasi tersebut Berdasarkan Perjanjian Kerja sama No. 10 Tahun 2012/690/Perj.I-Adm Perek/2012 tentang Kerja sama Pengelolaan Sumber Mata Air Cipaniis Kecamatan Pasawahan Kuningan.

Dilihat dari pelaksanaannya terdapat pembagian alokasi biaya yang tidak seimbang antara biaya pelestarian lingkungan dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan. Dampak yang muncul pada alokasi biaya kompensasi yang tidak seimbang ini adalah masyarakat sekitar Mata Air Cipaniis yang seharusnya dapat memiliki air yang berlimpah dan mendapat pemberdayaan masyarakat menjadi sebaliknya. Masyarakat selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau. Menurut masyarakat sekitar Jika kemarau panjang tiba sumur bor atau sumur artesis menjadi kering maka masyarakat sering membeli air dari pedagang air yang berkeliling atau meminta dari rumah kerabat yang masih tersedia air. Jika dilihat dari kondisi masyarakat, masyarakat memiliki kesempatan yang hilang secara kemudahan mendapatkan air dari Mata Air Cipaiis. Kondisi lahan di dataran tinggi lebih cepat surut dibanding dengan dataran rendah. Hal ini terjadi karena gaya gravitasi pada bumi yang menarik air tanah masuk lebih dalam pada dataran tinggi. Maka butuhkan akar tanaman yang mampu menyerap air lebih banyak agar dataran tinggi dapat lebih banyak menyerap air. Maka biaya kompensasi untuk pengghijauan desa sangat penting bagi mayarakat sekitar Mata Air Cipaniis agar air hujan yang masuk pada permukaan tanah dapat tertahan dengan bantuan pepohonan yang ada di sekitar desa. Perjanjian kerja sama memang di utamakan untuk PJL yang mana lingkungan telah berkontribusi besar untuk wilayah hilirnya maka perlu di perbaiki agar tetap Konstan dan tetap terjadi keseimbangan terhadap penyedian air dan pelesatarian alamnya.

Pada tahun 2018 terdapat penelitian dari Tommi Febrian yang mengemukakan studinya yaitu dana kompensasi yang diterima Kabupaten Kuningan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2,95 miliar dengan proporsi pembagian PAD kabupaten sebesar 82%, BPLH sebesar 16% dan penghijauan tingkat desa sebesar 1,5%. Dari persentase tersebut jauh dari persentase ideal menurut Tommi yaitu PAD kabupaten sebesar 62,5 BPLH sebesar 30% dan penghijauan tingkat desa sebesar 7,5%. Namun kompensasi ideal itu juga belum dipastikan tentang kesesuaian persentase yang dibutuhkan dari harga air sebesar Rp 110/m^3 apakan harga tersebut masih bisa mencukupi nilai kompensasi yang di butuhkan atau perentase alokasi yang seharusnya diubah. Untuk itu di butuhkan perhitungan kebutuhan kompensasi lingkungan secara cepat berdasarkan penilaian masyarakat tentang lingkungan di daerah resapan mata air Cipaniis dan berapa semestinya alokasi yang diberikan untuk desa agar kawasan dapat terlestarikan melalui kegiatan konservasi oleh masyarakt.

Untuk mengukur penilaian kerusakan lingkungan berdasarkan masyarakat sekitar dibutuhkan analisis dengan metode *Contingent Valuation Method* (CVM) merupakan metode penilaian lingkungan di mana tidak terdapat nilai pasarnya. Penilaian ini umumnya mengukur *Willingness to pay* (WTP) atau *willingness to accept* (WTA) pengunjung yang berkeinginan membayar atau menerima kompensasi atas kerusakan lingkungan. Dari permasalahan lingkungan ini dikategorikan sebagai nilai pilihan yang merupakan nilai di mana masyarakat berkeinginan menerima (WTA) untuk mencegah kerusakan lingkungan di masa mendatang, walaupun mereka tidak pasti akan terjun langsung untuk mencegah kerusakannya

Konsep WTA dipilih dalam menilai sumber daya alam berkaitan erat status kepemilikan sumber daya alam. Masyarakat sekitar Mata Air Cipaniis merasa memiliki sumber daya tersebut karena berada di lingkungan mata air meskipun mata air adalah barang

publik. Selain itu juga konsep WTA lebih relevan dari segi kebutuhan lingkungan di banding dengan konsep WTP yang menilai dari sisi kesanggupan untuk membayar suatu kerusakan lingkungan dan konsep ini juga lebih membawa masyarakat untuk berdiskusi terhadap masalah lingkungan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam hal ini yang menjadi responden yaitu masyarakat sekitar mata air yang terkena dampak. Wilayah yang terkena dampak secara umum dari adanya perjanjian kerjasama antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan yaitu Kecamatan Pasawahan dan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan serta Kecamatan Sumber yang terdapat di Kabupaten Cirebon yang terkena dampak kekeringan maka perlu diikutsertakan dalam kajian mengingat area resapan air yang lebih banyak di Kabupaten Kuningan yang letakannya berdekatan dengan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Tujuan dari studi ini untuk menetukan biaya kompensasi lingkungan desa masyarakat sekitar Mata Air Cipaniis sebagai pengganti kesempatan pemanfaatan mata air yang hilang

1. Menentukan besaran biaya yang dapat diterima masyarakat dan faktor yang menentukannya untuk mengkompensasi jasa lingkungan sekitar desa sebagai pengganti kesempatan yang hilang
2. Mengetahui nilai dari perjanjian yang mencukupi untuk kebutuhan untuk kompensasi wilayah sekitar mata air
3. Mengetahui persentase yang dialokasikan untuk penghijauan desa

2. Landasan Teori

Kerja sama yang dilakukan antar pemerintah daerah atau antar lembaga/perusahaan dalam bidang apapun dengan berprinsip saling menguntungkan untuk pihak-pihak yang bekerjasama. Dalam hal ini adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon yang terjadi pada tahun 2004 dan di revisi tahun 2012 dengan keputusan bersama Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon Nomor 1 2012 tentang kerja sama pengelolaan sumber mata air.

Maksud dari kerja sama ini adalah dalam rangka melestarikan sumber air melalui kegiatan konservasi sumber daya air catcment area pada mata air cipaniis yang saling menguintungkan atas pemanfaatan sumber daya air di desa paniis kecamatan pasahawan Kabupaten Kuningan bagi pelayanan masyarakat Kota Cirebon. Pelayanan yang di maksud adalah Kota Cirebon (PDAM Kota Cirebon) yang memanfaatkan sumber air baku air bersih untuk melayani kebutuhan pokok air bersih perkotaan kepada masyarakat Kota Cirebon yang belangsung 25 tahun sejak tauhun 2004 dan di revisi 5 tahun sekali. Pada pelaksanaannya Kota Cirebon memberi dana kompensasi kepada Kabupaten Kuningan atas kesepakatan bersama sebesar Rp110/m^3 setelah dikurangi toleransi kebocoran 20%

Akibat pemanfaatan air sebagai air baku air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon (PDAM Kota Cirebon) para petani yang sama-sama memanfaatkan sumber air dari mata air Cipaniis banyak mengalami kekurangan debit air untuk areal persawahan di areal irigasi dibawahnya. Akibat pasokan air yang selalu kurang dari jumlah aeal secara keseluruhan mengakibatkan pendapatan para petani menjadi berkurang, menurunnya pendapatan petani mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para petani, Ganti rugi yang diajukan dalam bentuk kompensasi tidak langsung membantu para petani mendapat bantuan secara teknis mau pun biaya Menurut Tommi Febrian (2018) dalam kajiannya yang berjudul Alokasi dan Pemanfaatan Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Air Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan terdapat Pemanfaatan mata air Cipaniis yang dilakukan oleh Kota Cirebon melalui PDAM Kota Cirebon dilaksanakan dalam skema pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services)

Dana kompensasi yang dibayarkan oleh Kota Cirebon melalui PDAM Kota Cirebon disetorkan kepada Kabupaten Kuningan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan dan selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti dapat dilihat pada alur penerimaan dan penyaluran dana kompenasai pada Gambar berikut

Dana dari kota Cirebon masuk Melalui BAPPENDA yang kemudian di salurkan ke

BPKAD Kabupaten kuningan untuk membuat rencana APBD yang berdasarkan program kerja SKPD Kabupaten kuningan untuk alokasi dana yang masuk ke PAD Kabupaten Kuninga senilai 62,5%, BPLHD akbupaten Kuningan 30%, dan pembanguan Desa 7,5%. Namun penelitian terdahulu Tommi Febria (2018) yang berjudul Alokasi dan Pemanfaatan Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Air Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan telah menemukan bahwa alokasi dana kompensasi tersebut belum sesuai prosentase ideal kompensasi. Dana kompensasi yang diterima pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2,95 miliar dengan proporsi pembagian dana dapat dilihat pada Tabel persandingan alokasi dan pemanfaatan dana kompensasi dan eksisting tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Alokasi Pemanfaatan Dana Kompensasi dan Realisasi kompensasi

Tahun 2016

No	Pemanfaatan	Realisasi kompensasi		alokasi Kompensasi	
		Proporsi (%)	Besaran (Rp)	Proporsi (%)	Besaran (Rp)
1	**PAD Kuningan**	**82,3**	**2.424.453.247**	**62,5**	**1.840.283.297**
2	**BPLHD**	**16,2**	**475.000.000**	**30**	**883.335.974**
	Program pelindungan dan konservasi SDA	12,8	375.000.000	Tidak ada ketentuan alokasi program konservasi	
	Gerakan masal penanaman pohon	3,4	100.000.000		
3	**Dana Desa**	**1,5**	**45.000.000**	**7,5**	**220.833.994**
	Penghijauan	0	0	4,5	132.500.396
	Pembangunan dan operasional desa	1,5	45.000.000	1,5	44.166.796
	Perbaikan dan pembangunan Irigas	0	0	1,5	44.166.796
Total Kompensasi		**2.944.453.247**			

Sumber: Tommi Febrian (2018)

Dari tabel di atas di temukan jika pada tahun 2016 prosentase dana untuk PAD Kabupaten Kuningan senilai 82,3% yang mana 20,2 % lebih tinggi darai dana kompensasi ideal sedangkan dana untuk BPLHD 16,2 yang mana 14,8 % lebih tinggi darai dana kompensasi ideal dan yang terakhir dana desa hanya di beri 1,5% yang hanya di berikan pada dana orerasional desa saja.

Hal ini yang membuat penghijauan desa perlu ditinjau karena masuk dalam kebutuhan kompensasi yang belum masuk alokasi biayanya. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mencari kebutuhan penghijauan desa dari aspirasi masyarakat melihat fenomena kekeringan dan kesulitan air untuk kebutuhan sehari – hari dengan metode VCM

.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesediaan Menerima Masyarakat Sekitar Mata Air Cipaniis

Besaran nilai kompensasi lingkungan terhadap Mata air Cipaniis yang bersedia di terima oleh masyarakat sekitar Mata Air Cipaniis antara Rp. 300 – Rp. 2000/ m^3. Frekuansi yang paling banyak merupakan nilai WTP Rp. 700/ m^3 dengan jumlah 21 orang alasanya karena mereka kurang merasa kehadiran dari kompensasi lingungan. Nilai yang didapat pada rata – rata WTA adalah Rp. 833/m^3.untuk lebih jelasnya terhadap nilai WTA yang di dapat tersebut, dapat di lihat pada tabel di berikut:

Tabel 2 Rata – Rata Nilai WTA Responden

No	Nilai WTA (Rp/m^3 / $jiwa$)	frekuensi Sampel (Jiwa)	Rata - Rata WTA (Rp/m^3)
1	300	12	36,00
2	500	21	105,00
3	700	19	133,00
4	800	13	104,00
5	1000	18	180,00
6	1500	13	195,00
7	2000	4	80,00
Total		**100**	**833,00**

Sumber: analisis

Berdasarkan hasil analsisi Regresi Bergada, diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut :

Y = 2,570 + 0,256 X2 + 0,46 X5 + 0,08 X6

Nilai koefisien regresi pada variabe - variabel independennya menggambarkan apabila diperkirakan variabel independennya naik sebesar satu unit dan nilai variabel independen lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel independennya.

Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 2,570. Artinya, jika variabel Kesediaan membayar kompensasi tidak dipengaruhi oleh variabel independennya yaitu Jenis Kelamin, Pendapatan per bulan, Jumlah anggota keluarga, Status kepemilikan rumah, Kualitas air yang didapat, Kuantitas air yang didapat, dan Persepsi PJL akan bernilai 2,570. Tanda koefisien regresi variabel independen menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan Kesediaan membayar kompensasi.

Dilihat dari persamaan regresi linier berganda variabel pendapatan perbulan, stastus kepemilikan rumah, dan kualitas air yang didapat adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima kopensasi dengan berbanding lurus dengan hipotesis. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi menjadi faktor masayarakat mau menerima kopensasi dan yang kedua adalah kualitas air yang di dapat oleh masyarakat

Hasil Penentuan Biaya Kompensasi Penghijauan Desa

Pada analisis ini akan di tentukan biaya kompensasi terhadap penghijauan desa yang didapat dari masyarakat sekitar Mata Air Cipaniis. Pada analisis sebelumnya telah di ketahui besaran harga yang mampu diterima oleh masyarakat sekita Mata Air Cipaniis sebagai pihak yang terkena dampak lingkungan yaitu Rp. 833/m^3. Harga tersebut merupakan nilai WTA yang akan menjadi nilai selisih dari harga air yang sudah di sepakati yaitu Rp. 110/m^3. Berikut ini merupakan selisih dari harga yang telah ditetapkan dan harga WTA:

$$\textbf{Nilai perbandingan penghijauan desa} = \frac{\textbf{Harga WTA}}{\textbf{Harga perjanjian}}$$

Nilai perbandingan penghijauan desa $= \frac{833}{110} = \frac{7{,}6}{1}$

=7.6 kali lipat

Berdasarkan hasil tersebut masyarakat menilai jika nilai Rp. 110/m^3 masih kurang untuk biaya perbaikan lingkungan untuk desa. Perlu adanya 7,6 kali lipat untuk menambah debit air untuk kehidupan sehari – hari dan untuk pemberdayaan masyarakat seperti perbaikan saluran irigasi dan lain – lainnya. Sesuai dengan empirisnya WTA selalu lebih tinggi secara signifikan dari harga yang ditawarkan walaupun dengan produk yang sama (Perman,2011). Karena WTA dinilai berdasarkan objek peneliti dan lingkungan sekitar.

Alokasi Dana untuk Biaya Kompensasi penghijauan Desa

Pada lima tahun terakhir rata – rata dana kompenasi yang diterima Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 2.645.816.536. Dana tersebut akan dialokasikan pada kebutuhan penghijauan desa sesuai dengan harga kesediaan menarima masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Alokasi Dana Kompensasi Penghijauan Desa

Alokasi	Nilai Ideal		Alokasi Baru
	persentase	Rupiah	Rupiah
PAD Kabupaten	62,5	1.653.635.335	0
BPLH	30	793.744.961	793.744.961
Penghijauan Desa	7,5	198.436.240	904.869.255
Total	**100**	**2.645.816.536**	**2.645.816.536**
Sisa			**947.202.320**

Sumber: analisis

Pada tabel di atas menunjukan BPLHD diberi alokasi senilai Rp.793.744.961 Alokasi tersebut sesuai dengan Nilai ideal yang di berlakukan saat ini. Berbeda dengan penghijauan desa yang telah berubah yang didasari nilai WTA yang masyarakat terima menjadi Rp. 904.869.255. Hal tersebut disebabkan karena nilai dari persentase penghijauan desa telah dikalikan perbandingan dari kesediaan masyarakat seniai 7,6 kali lipat dari harga kesepakatan sebesar Rp. 110/m^3 yang diebabkan penilaian masyarakat tentang pelestarian lingkungan desa sekitar mata air. Hasil jumlah antara alokasi BPLH dan Penghijauan desa, terdapat sisa senilai Rp. 947.202.320. Artinya nilai perjanjian sebesar Rp. 110/m^3 masih mencukupi untuk melakukan kompensasi nammun persentasenya dirubah sesuai kebutuhan pelestarian lingkungan mata air. Berikut ini merupakan persentase alokasi baru untuk kompensasi jasa lingkungan.

Tabel 4 Persentase Baru Dana Kompensasi dari Kota Cirebon

Alokasi	Persentase	Rupiah
PAD Kabupaten	35,8	947.202.320
BPLH	30	793.744.961
Penghijauan Desa	34,2	904.869.255
Total	**100**	**2.645.816.536**

Sumber: analisis

Pada tabel di atas menujukan persentase baru untuk dana kompensasi dari Kota Cirebon yang mana terdapat nilai WTA dari masyarakat yang terkena dampak dari adanya perjanjian kerja sama. Pada dana kompensasi memiliki nilai sisa setelah digunakan untuk BPLH dan penghijauan desa sebesar Rp.947.202.320 nilai tersebut dapat digunakan untuk PAD kabupaten Kuningan. pada persentase ideal menurut Tommi (2018) terdapat alokasi dana untuk PAD kabupaten namun penggunaannya bukan untuk penghijauan daerah reapan air yang dalam perjanjian kompensasi tersebut untuk pelestarian air melalui konservasi sumbr daya air termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat sekitar mata air. Maka alokasi sisa tersebut dapat digunakan untuk PAD Kabupaten

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terdapat kesimpulan dari beberapa analisis yang yang telah di lakukan yaitu:

1. Analisis kesediaan menerima
   a. Berdasarkan nilai kesedian menerima didapat nilai rata – rata sebesar Rp. 833/m^3.
   b. Berdasarkan faktor yang mempengarui kesediaan menerima variabel pendapatan perbulan, stastus kepemilikan rumah, dan kualitas air yang didapat adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima kopensasi dengan berbandin lurus dengan hipotesis. Faktor pertama yaitu faktor pendapatan perbulan menjadi faktor masayarakat mau menerima kopensasi. Di wilayah mata air tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah di tambah lagi daerah tersebut mejadi daerah yang kesulitan air. Fakotor yang kedua masih berkaitan dengan ekonomi yaitu status kepemilikaan rumah masyarakat yang memiliki rumah sendiri lebih percaya diri untuk menerima konpensasi karena merasa memiliki yang ketiga didapat kualitas air yang di dapat oleh masyarakat semakin baik kualitas airnya maka semakin sadar akan pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup masyarakat
2. Jumlah alokasi BPLHD senilai Rp.793.744.961 Alokasi tersebut sesuai dengan Nilai ideal yang di berlakukan saat ini. Berbeda dengan penghijauan desa yang telah berubah yang didasari nilai WTA yang masyarakat terima menjadi Rp. 904.869.255. dari hasil jumlah antara aokasi BPLH dan Penghijauan desa, terdapat sisa Senilai Rp. 947.202.320. Artinya nilai perjanjian sebesar Rp. 110/m^3 masih mencukupi untuk melakukan kompensasi.
3. persentase baru untuk dana kompensasi dari Kota Cirebon yang mana terdapat nilai WTA dari masyarakat yang terkena dampak dari adanya perjanjian kerja sama adalah PAD kabupaten sebesar 35,8 %, BPLHD 30%, dan penghijauan desa sebesar 34,2%

5. Saran

Saran Teoritis

Pada bagian ini akan paparkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan Penetuan Biaya Kompensasi Air Dari Metropolitan Cirebon Terhadap Masyarakat Sekitar Mata Air Cipaniis, Kabupaten Kuningan (1) Adanya kajian srategi pelestarian daerah Taman Nasional Gunung Ciremai. Strategi Pelestarian Gunung Ciremai tersebut di kaji agar mendapat nilai kebutuhan dana untuk pelestarian Taman Nasional Gunung Ciremai dan mejadi Priortas alokasi dana Kompensasi (2) Kajian SPAM Regional untuk kawasan perkotaan metropolitan Cirebon Raya SPAM regional tersebut memungkinkan menemukan skema alternatif baru dalam rangka memenuhi kebutuhan air di kawasan Metropolitan Cirebon Raya agar tidak berpato pada satu Sumber mata air

Saran Praktis

Salah satu faktor keberhasilan dari Studi Penentuan Biaya Kompensasi Air Dari Kota Cirebon Untuk Penghijauan Desa Sekitar Mata Air Cipaniis Kabupaten Kuningan ini tidak terlepas dari faktor implementasi pada lapangan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kuningan yang Berwenang terhadap alokasi dana kompensasi. Untuk memenuhi perjanjian kerjasama pengelolaan sumber mata air Cipaniis.dengan Kota Cirebon perlu adanya kajian menyeluruh tentang alokasi dana Kompensasi agar semua sub sektor terpenuhi untuk kepentingan pelestarian alam..

Daftar Pustaka

[1] Kusumasari. 2012. Evaluasi Efektivitas Pembayaran Jasa Lingkungan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

[2] Perman R. et al., 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. Harlow: Pearson Education Limited

[3] Ramdan, hikmat. 2006. PENGELOLAAN SUMBER AIR MINUM LINTAS WILAYAH DI KAWASAN GUNUNG CIREMAI PROPINSI JAWA BARAT. SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR.

[4] Sumarman, 2006, KAJIAN KOMPENSASI AIR BAKU UNTUK AIR BERSIH DARI PEMERINTAH KOTA CIREBON KE PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN, Tesisi Memenuhi Salah Satu Persyaratan Program Magister Teknik Sipil

[5] Tommi Febrian. 2018. Alokasi dan Pemanfaatan Kompensasi Pembayaran Jasa Lingkungan Air Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)